



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	13 (Tiga Belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 6 April 2017
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2016;</li><li>2. Efektifitas dan Tindak Lanjut Pemutihan Dokumen TKI di Malaysia melalui Program E-KAD dalam mengurangi TKI yang di deportasi;</li><li>3. Penempatan TKI pada negara-negara yang belum memiliki MoU Penempatan TKI;</li><li>4. Penjelasan terkait kemungkinan pemutihan dokumen TKI di Arab Saudi;</li><li>5. Penjelasan terkait progress penyelesaian kasus tenggelamnya kapal TKI di Batam (santunan korban dan keluarga korban).</li></ol>
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf M.E., S.T,M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, S.H/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none"><li>A. 25 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 3 orang anggota izin;</li><li>B. Kepala BNP2TKI beserta jajaran.</li></ol>

## I. PENDAHULUAN

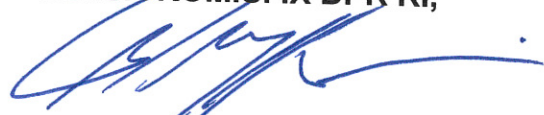
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 14.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, dan meningkatkan nilai tawar terhadap martabat TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri antara lain, pemutihan dokumen, deportasi dan amnesti secara maksimal.
2. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk menyiapkan alokasi anggaran khusus dan bekerjasama dengan lembaga kementerian terkait untuk membantu pemulangan, pemutihan dokumen bagi TKI peserta Amnesti di luar negeri yang benar-benar membutuhkan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah sehubungan dengan adanya moratorium penempatan TKI informal ke Arab Saudi, untuk memberikan dispensasi bagi TKI peserta Amnesti di Arab Saudi yang ingin kembali bekerja, sepanjang memiliki izin tertulis dan dokumen ketenagakerjaan dari pemberi kerja.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk membuat terobosan-terobosan baru bagi pemulangan TKI yang dideportasi secara prosedural maupun pemulangan secara ilegal guna meminimalisir kecelakaan kapal yang terus terjadi.
5. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk meningkatkan peran dan keterlibatan dalam proses penyelesaian *Enforcement Card* (E-KAD) bagi TKI agar efektif mengurangi angka deportasi dari Malaysia.
6. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI paling lambat 13 April 2017.

**Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB**

**KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,**



**DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol**

**A-415**